

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa seringkali dianggap sebelah mata oleh masyarakat dikarenakan desa identik dengan keterbelakangan serta lambannya dalam hal pembangunan. Ekonomi pedesaan juga sering dibandingkan dengan ekonomi perkotaan yang cenderung tidak monoton dan terus berkembang, oleh sebab itu peningkatan perekonomian di daerah pedesaan diperlukan untuk meningkatkan nilai desa dimata masyarakat. Peningkatan yang dimaksud ialah dengan melakukan peningkatan dalam beberapa hal seperti produktivitas dan keanekaragaman usaha, sarana prasarana, dan pengoptimalan sumber daya yang ada yang dijadikan sebagai dasar pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Pembangunan dari desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi secara berkeadilan. Hal tersebut sejalan dengan butir ketiga Nawacita Presiden yaitu ‘membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan’. Untuk itu pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa desa yang merupakan entitas terkecil dapat mejadi penopang utama pelayanan masyarakat serta dapat menjadi penggerak perekonomian negara.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Rifhi Siddiq desa merupakan wilayah yang dihuni oleh penduduk dengan tingkat kepadatan yang rendah, memiliki interaksi sosial yang bersifat homogen dan mampu berinteraksi dengan wilayah disekitarnya, serta bermatapencarian dalam bidang agraris. Maka dapat disimpulkan bahwa desa

merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat atau penduduk dalam batas wilayah tertentu yang memiliki pemerintahan sendiri dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah serta masyarakat atau penduduknya memiliki interaksi sosial yang bersifat homogen dan berrmatapencarian dalam bidang agraris.

Desa memiliki banyak potensi sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun sebagian besar desa yang memiliki sumber daya alam belum dapat mengelola sumber daya alam tersebut secara maksimal, bahkan ada sumber daya alam yang belum disadari keberadaannya sehingga banyak sumber daya alam yang kondisinya memprihatinkan karena tidak dirawat oleh penduduk sekitar maupun pemerintah desa. Faktor lain yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya alam di pedesaan yaitu kurangnya pemahaman penduduk desa dan pemerintah desa akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam. Apabila sumber daya alam tersebut dikelola dengan baik dan dengan maksimal maka perekonomian masyarakat desa disekitar tempat sumber daya tersebut berada akan mengalami peningkatan, sehingga secara bertahap desa tersebut akan mulai berkembang.

Setelah dikeluarkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, setiap desa di Indonesia diwajibkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya, selain itu setiap desa juga berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Salah satu cara yang ditempuh untuk dapat memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Oleh sebab itu setiap desa diberbagai wilayah di Indonesia dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fungsi dari BUMDes yang merupakan pilar perekonomian desa adalah sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial BUMDes berperan sebagai lembaga yang menyediakan pelayanan sosial untuk memenuhi kepentingan

masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes memberikan keuntungan bagi desa dengan melakukan penawaran pada sumber daya lokal (barang dan jasa) kepada pasar.

BUMDes bukan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, melainkan lembaga yang didirikan atas prakarsa dari masyarakat yang berdasar pada potensi yang dapat dikembangkan. Bentuk dari BUMDes berbeda-beda di tiap desa tergantung dari potensi, sumber daya, dan karakteristik yang dimiliki oleh tiap-tiap desa tersebut. Di Indonesia pada tahun 2018 tercatat ada 45.549 unit BUMDes yang sudah terbentuk, jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2014 yang hanya berjumlah 1.022 unit. Hal ini menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya BUMDes untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Beberapa unit usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes antara lain pasar desa, transportasi, pertanian, simpan pinjam, peternakan, agroindustri, kerajinan rakyat, dan obyek wisata desa. Pembentukan unit usaha tersebut didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh desa serta kebutuhan dari masyarakat desa tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tujuan dari pembentukan unit usaha tersebut adalah untuk mendukung perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat dengan adanya jaringan kerjasama yang dimiliki oleh BUMDes. Contohnya BUMDes membantu memasarkan produk atau usaha yang dijalankan oleh masyarakat sehingga masyarakat di luar desa akan mengetahui produk atau usaha dari desa tersebut.

Salah satu wilayah di Jawa Timur yang pembentukan BUMDesnya dapat dikatakan sukses ialah di Kabupaten Malang, dengan unit usaha yang dikelola yaitu Desa Wisata. Dasar dari pembentukan Desa Wisata di Kabupaten Malang ialah dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang tersedia yang dapat memberikan keuntungan bagi desa tempat sumber daya tersebut berada. Sebagai contoh yaitu desa wisata di Pujon Kidul yang sudah masuk ke dalam media sosial milik Bapak Presiden Joko Widodo. Desa Wisata Pujon Kidul merupakan tempat wisata yang menyediakan berbagai fasilitas seperti

menyediakan berbagai tempat menarik untuk berfoto, menyediakan beberapa stan yang menjajakan kuliner dan berbagai pernak-pernik, serta menyediakan beberapa wahana yang dapat dicoba oleh pengunjung. Selain menyediakan beberapa fasilitas yang telah disebutkan di atas, Desa Wisata Pujon Kidul juga menyediakan beberapa fasilitas lainnya yang menarik, seperti pembelajaran mengenai pertanian dan peternakan yang cocok untuk anak-anak serta Kafe Sawah yang menyajikan pemandangan berupa hamparan sawah dengan udara yang sejuk yang tidak akan ditemukan di daerah perkotaan.

Adapun penelitian telah dilakukan untuk menilai bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya BUMDes Desa Wisata bagi peningkatan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa. Sebagian besar penelitian menunjukkan hasil yang positif, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Permadi & R, 2019) di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren memberikan beberapa dampak positif yaitu dengan meningkatnya pendapatan desa serta terbukanya lapangan pekerjaan baru yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, namun penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyo, Alfani, Rosihan, & Utama, 2019) di Desa Sipatuhu menunjukkan hasil bahwa BUMDes Sipatuhu belum aktif mengelola Desa Sipatuhu menjadi Desa Wisata. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya sumber daya manusia khususnya aparatur Desa Sipatuhu yang belum mengetahui perencanaan dan pengelolaan BUMDes secara benar dikarenakan akses informasi yang belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Desa Sipatuhu.

Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan karena dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai BUMDes dan dampak yang ditimbulkan bagi desa yang memiliki BUMDes terutama dalam sektor Desa Wisata. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan agar desa-desa yang memiliki BUMDes untuk lebih meningkatkan kinerja BUMDes di desanya agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam hal ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan satu tempat untuk dijadikan objek

penelitian, penelitian ini menggunakan tiga objek penelitian yang diambil di Kabupaten Malang. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Beberapa BUMDes Desa Wisata di Kabupaten Malang)”**.

1.2. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh ialah:

1. Unit-unit apa saja yang dikelola oleh BUMDes Desa Wisata di Kabupaten Malang?
2. Apa alasan yang mendorong pembentukan BUMDes Desa Wisata?
3. Bagaimana peran BUMDes Desa Wisata di Kabupaten Malang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar BUMDes tersebut berada?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis unit-unit yang dikelola oleh BUMDes Desa Wisata di Kabupaten Malang.
2. Menganalisis alasan yang mendorong pembentukan BUMDes Desa Wisata.
3. Menganalisis peran dari BUMDes Desa Wisata di Kabupaten Malang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar BUMDes tersebut berada.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti
Bagi peneliti, penelitian ini memiliki manfaat yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkuçeçwara dan kedepannya diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wisata dan pengaruhnya bagi perekonomian masyarakat pedesaan.

2. Bagi akademik

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan bagi kalangan akademik. Dan kedepannya penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lagi.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Desa di Kabupaten Malang agar kedepannya dapat lebih memaksimalkan BUMDes Desa Wisata yang ada di wilayahnya.